



NAZHARAT:
JURNAL KEBUDAYAAN
Vol. 30 No. 01, Juni 2024



**IMPLEMENTASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI DINAS
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA JAMBI**

Nailul Husna¹ Fridinanti Yusufhin²
 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 E_mail: nailulhusna@uinjambi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian melalui reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi sudah mengimplementasikan perpustakaan berbasis inklusi sosial sesuai dengan diamanatkan Perpustakaan Nasional RI sejak Tahun 2019 atas dasar inisiatif pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. Pengimplementasian perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi melalui peningkatan literasi dengan penyediaan informasi yang dibutuhkan masyarakat, melaksanakan kegiatan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat serta menambah ilmu pengetahuan yang menjadikan masyarakat lebih literat. Kendala yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dalam menjalankan program perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah kurangnya anggaran dana dan sumber daya manusia.

مستخلص

البحث

Abstract

Kata Kunci: perpustakaan, inklusi sosial, Jambi

كلمات

أساسية

Keyword

INTRODUCTION (مقدمة)

Perpustakaan merupakan institusi penyedia sumber informasi terseleksi yang akan digunakan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan informasi, oleh karena harus memiliki fungsi yang strategis dalam kehidupan masyarakat. Peran perpustakaan sebagai sarana pengembangan intelektual juga mempunyai tanggung jawab dalam pembangunan pendidikan dan karakter masyarakat. Perpustakaan harus menyediakan pelayanan yang beragam karena sebagian besar pelayanan perpustakaan diberikan akses secara bebas. Perpustakaan juga dituntut untuk memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, misalnya memberikan perubahan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat salah satu permasalahan yang timbul adalah adanya golongan masyarakat yang tereksklusi. Masyarakat yang tereksklusi atau pemisahan golongan umumnya terjadi karena disebabkan oleh perbedaan atau kondisi yang dialaminya. Sebagai contoh karena perbedaan warna kulit, suku, ras, agama atau status sosial yang direpresentasikan dalam bentuk apakah kaya atau miskin, menjadikan suatu golongan menjadi tereksklusi. Sehingga muncul golongan di masyarakat yang tereksklusi atau berusaha dimarjinalkan dan tidak dianggap dalam masyarakat (Muhammad Usman Noor, 2019).

Perpustakaan umum mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan informasi yang inklusif, yang tidak membedakan siapapun dan atribut-atribut yang melekat pada masyarakat. Salah satu kriteria orang yang tereksklusi ialah mereka yang tidak memiliki akses ke perpustakaan karena berbagai keadaan, seperti tidak memiliki kesempatan ke perpustakaan karena jarak atau kesibukan-kesibukan. Jika perpustakaan tidak bisa mengimbangi atau memberikan solusi bagi mereka yang tidak mempunyai waktu ke perpustakaan maka secara perlahan perpustakaan tidak akan bisa *survive* dalam memberikan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Oleh sebab itu, paradigma perpustakaan mulai mengalami pergeseran dari yang awalnya tempat menyimpan buku akan menjadi lembaga yang strategis yang mempunyai peran dalam mengiringi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkannya.

Pengembangan SDM dalam rangka untuk mempersiapkan manusia yang unggul menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan Nasional. Selain menyiapkan SDM yang unggul, pemanfaatan sumber daya informasi yang tersedia di perpustakaan dapat diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi dengan menyediakan informasi-informasi yang bersifat stimulan maupun menambah kemampuan kognitif masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Perpustakaan akan menjadi ruang terbuka pada seluruh golongan masyarakat untuk belajar sehingga informasi yang di dapat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Perpustakaan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk berbenah sehingga dapat menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat dan harus mampu memberikan pelayanan berbasis inklusi sosial secara merata. Hal ini diperkuat dalam Undang-

undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang tertera pada bab 2 pasal 5 yang secara eksplisit menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial juga sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam *IFLA Multicultural Library Manifesto* yang menyebutkan bahwa perpustakaan dalam perannya menghadapi masyarakat global, jasa layanan perpustakaan harus bisa dan mampu melayani seluruh anggota kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pada pasal 2 menyebutkan bahwa “Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan” (Undang-undang Perpustakaan, 2007). Merujuk pada undang-undang tersebut, maka perpustakaan mengemban amanah sebagai tempat belajar sepanjang hayat dan kemitraan bagi masyarakat yang harus dikelola secara profesional dan terbuka ke semua kalangan guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan untuk berusaha. Dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial layanan perpustakaan mendesain perpustakaan dan koleksinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seoptimal mungkin. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dimulai pada tahun 2018 oleh Perpustakaan Nasional RI sebagai respon *terhadap Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga diatur dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial wajib untuk diimplementasikan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perubahan dalam peran perpustakaan yang bertujuan meningkatkan literasi masyarakat dan kualitas hidup mereka. Tujuan utamanya ialah meningkatkan kesejahteraan dengan aksesibilitas, relevansi dan manfaat layanan perpustakaan untuk semua anggota masyarakat. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Selain itu, perpustakaan juga berperan dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat sehingga mereka bisa lebih mandiri dan berdaya guna dalam menghadapi perubahan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi merespon dengan baik dan mendukung program yang berkenaan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan bukan hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, akan tetapi juga sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam peran utamanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat dan pusat kebudayaan, perpustakaan juga memiliki peran penting dalam penyebaran informasi, pendidikan dan pemeliharaan kekayaan intelektual manusia. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi memberikan layanan perpustakaan dengan tujuan untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang

inklusif dalam rangka pengembangan SDM masyarakat melalui penguatan literasi. Pelaksanaan layanan tersebut sudah dijalankan sejak tahun 2021. Dalam upaya mendukung program dari Perpustakaan Nasional tentang perpustakaan berbasis inklusi sosial, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi telah melaksanakan berbagai kegiatan. Pelatihan Bahasa Isyarat Dasar Indonesia (BISINDO) bersama PUSBISINDO yang dilaksanakan pada tahun 2022, merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mengarah pada perpustakaan berbasis inklusi sosial.

THEORETICAL FRAMEWORK (نظريات)

1. Inklusi Sosial di Perpustakaan

Menurut Simarmata di dalam Buku Prima Putra, secara teoritis inklusi sosial adalah proses yang memberikan daya pada individu atau kelompok tertentu untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial baik secara menyeluruh atau sebagian (Prima Putra Budi Gutama, 2020). Menurut Syarif dalam tulisan Wawan Budiyanto perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah bagaimana pendekatan kearifan lokal dengan memengaruhi untuk bisa bergerak dan terdorong menciptakan lapangan kerja sendiri dengan apa yang tersedia di daeran dan pengetahuan yang di dapat (Wawan Budiyanto, 2022).

Sementara itu, inklusi sosial di bidang perpustakaan mulai diwacanakan pada tahun 1999 melalui dokumen *Libraries for All: Social Inclusion in Public Libraries Policy Guidance for Local Authorities in England October 1999*. Kunci dalam pengembangan inklusi sosial di bidang perpustakaan, yaitu (Departement for Culture, 1999):

- a. Perlunya inklusi sosial di perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah titik fokus untuk penyediaan layanan informasi di masyarakat, sehingga mereka memiliki peran penting untuk dimainkan dalam membantu mengembangkan inklusi sosial sebagai perwujudan dari belajar sepanjang hayat.
- b. Identifikasi dan hambatan keterlibatan masyarakat.
- c. Kontek inklusi sosial, pada saat yang sama masalah individu sering terkait dengan masalah lokalitas juga keadaan pribadi. Namun proyek pengembangan masyarakat di Inggris dan di tempat lain telah menunjukkan bawa kebijakan yang berhasil untuk inklusi sosial harus mendorong orang untuk mengambil tindakan bersama pada masalah yang mempengaruhi lingkungan mereka. Yang menjadi konteks dalam inklusi sosial ini adalah keterlibatan masyarakat dalam pembaharuan lingkungan.
- d. Kebijakan inklusi sosial, inklusi sosial harus diurusutamakan sebagai prioritas kebijakan untuk perpustakaan dan layanan informasi. Pengarustamaan berarti menempatkan prinsip di jantung pembuatan kebijakan dan pengembangan layanan. Masalah inklusi sosial harus

mendukung semua aspek penyediaan perpustakaan. Ini berlaku di mana layanan ditingkatkan dan ketika ada tekanan untuk mengurangi layanan perpustakaan. Perpustakaan umum dan layanan informasi harus tersedia dan dapat diakses oleh semua orang. Untuk membantu mewujudkan tujuan ini, perpustakaan harus memberikan layanan kepada kelompok warga tertentu, seperti orang lanjut usia dan orang cacat, untuk membantu mereka mengatasi pengucilan mereka dan memungkinkan mereka untuk lebih aktif dan terinformasi. Perpustakaan umum menggunakan layanan perpustakaan keliling sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan koleksi yang dibutuhkan.

- e. Tantangan yang dihadapi perpustakaan
 - 1) Isu keberlanjutan dan sumber daya jangka panjang
 - 2) Sumber daya yang memadai akan diperlukan untuk mempertahankan layanan dan kebutuhan pertimbangan khusus untuk diberikan pada masalah pendanaan yang berkaitan dengan penyediaan TIK dan untuk memperluas pembukaan jam kontribusi yang lebih signifikan terletak pada pengembangan jangka panjang strategi dan langkah-langkah inklusi sosial yang berkelanjutan.
 - 3) Kebutuhan akan perubahan budaya dalam perpustakaan.
 - 4) Menanggapi lingkungan TIK baru, kedatangan era informasi dan dampaknya terhadap kehidupan orang, berarti perpustakaan memiliki peran penting dalam mengembangkan masyarakat informasi yang inklusif secara sosial. Landasannya adalah menyediakan akses lokal dan terjangkau ke TIK.
 - 5) Menunjukkan manfaat dan hasil.

2. Konsep Dasar Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Perpustakaan bertransformasi berarti menjadikan perpustakaan sebagai wadah meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk mengubah kualitas hidup yang lebih baik. Upaya ini dilakukan dengan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki di suatu wilayah, dibantu dengan informasi yang disediakan di perpustakaan (Suharyanto Malawa, 2019). Perpustakaan berbasis inklusi sosial berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk seluas-luasnya memanfaatkan perpustakaan dengan strategi (Lubis Hairani, 2022):

a. Peningkatan Pelayanan melalui Buku dan Internet

Perpustakaan memastikan ketersediaan buku-buku sesuai kebutuhan masyarakat/ pemustaka seperti petani membutuhkan bahan bacaan bagaimana cara bertani yang menghasilkan hasil yang baik bagi tanaman pertaniannya ataupun pedagang butuh referensi kiat-kiat sukses berdagang dan lain-lain.

b. Pelibatan Masyarakat

Sehubungan dengan kebutuhan tersebut maka perpustakaan dalam menjalankan program/ kegiatan harus melibatkan masyarakat agar apa yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perpustakaan harus membuat perencanaan yaitu identifikasi permasalahan yang berkembang di masyarakat, untuk kemudian membuat langkah-langkah strategis dan kemudian mengadakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Membangun Kemitraan

Program perpustakaan berbasis inklusi sosial telah membuktikan bahwa perpustakaan berperan aktif dalam menciptakan SDM unggul, profesional, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab. Akan tetapi, untuk senantiasa mempertahankan kualitas program yang ada, perpustakaan tidak dapat bekerja sendiri. Perpustakaan harus melibatkan peran serta dari dinas di daerah. Untuk melibatkan dinas/ pihak lain maka hasil identifikasi seperti yang telah dicontohkan pada point pelibatan masyarakat, dapat diidentifikasi bahwa kebutuhan pelajar dapat bekerja sama dengan beberapa instansi atau pihak yang berkompeten di bidangnya, untuk ibu-ibu PKK dapat bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja atau pihak lain yang bersinergi. Dengan adanya kemitraan, program/ kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial akan terlaksana sesuai dengan tujuan perpustakaan membangun masyarakat yang literat dan sejahtera.

METHOD (طريقة \ منهج البحث)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, merupakan sebuah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena penelitian dengan rinci. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari pemahaman yang mendalam terhadap pandangan, makna, persepsi, serta pengalaman dari individu yang sedang terlibat dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi.

FINDINGS & DISCUSSION (بحث ومناقشة)

1. Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, kegiatan masyarakat dan pusat kebudayaan.

Kita ketahui bahwa perpustakaan mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi karena perpustakaan memiliki beragam informasi, sumber pendidikan, sarana penyimpanan dan kekayaan intelektual manusia. Perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi yang terbaru, tetapi juga masih mengamankan informasi-informasi lama yang berhubungan dengan kearifan lokal dan kebudayaan. Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa perpustakaan menjadi pusat kegiatan masyarakat agar bisa belajar secara kontekstual serta berbagi pengalaman. Dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat yang berbasis inklusi sosial dan tidak membedakan masyarakat dari segi ras, warna kulit dan lain sebagainya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi melaksanakan kegiatan pelatihan BISINDO (Bahasa Isyarat Dasar Indonesia) bersama PUSBISINDO pada tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat membantu penyandang disabilitas tuli untuk bisa berkomunikasi dan mendapatkan haknya sebagai masyarakat Indonesia.

DKP Kota Jambi selalu melakukan monitoring ke masyarakat untuk melihat kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan dalam menunjang proses pendidikan. Pemerataan informasi bagi masyarakat ini merupakan tanggung jawab perpustakaan dalam memberikan akses maupun pelayanan secara prima. DKP Kota Jambi melihat masih banyak guru-guru TK dan SD yang kesulitan untuk mengkomunikasikan informasi yang ingin mereka sampaikan kepada anak didiknya. Untuk tataran TK- SD anak-anak biasanya lebih suka mendengarkan pembelajaran dalam bentuk cerita. Berdasarkan fenomena ini DKP Kota Jambi mengadakan kegiatan mengenai pelatihan teknik bercerita (*story telling*) bagi guru TK-SD se Kota Jambi yang diadakan pada tahun 2021 lalu. Pelatihan ini dilaksanakan di Perpustakaan Umum Kota Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang yang dilaksanakan selama 2 hari. Setelah diadakan pelatihan ini, para guru merasa lebih mudah untuk menyampaikan pembelajaran dengan metode *story telling* dan anak didik juga lebih antusias dalam mengikuti pelajaran.

Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DKP Kota Jambi tersebut terlihat bahwa perpustakaan berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam mengatasi masalah yang sedang di hadapi. Hal ini menunjukkan DKP Kota Jambi sangat antusias dalam membantu pengembangan pengetahuan masyarakat dan ikut serta memberikan wadah kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mereka butuhkan.

2. Perpustakaan dirancang lebih berdayaguna bagi masyarakat

Perpustakaan tidak lagi hanya menyediakan informasi yang hanya bisa diakses di perpustakaan. Akan tetapi perpustakaan harus merancang konsep bagaimana informasi secara cepat dan tepat guna bisa sampai ke masyarakat sesuai sasaran. Perpustakaan dituntut untuk lebih berdaya guna bagi masyarakat. Konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial akan melihat bagaimana perpustakaan ikut serta dan berperan aktif untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan. Untuk mendukung perpustakaan berbasis inklusi sosial, DKP Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. DKP Kota Jambi telah mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan pengolahan bahan ikan yang dilaksanakan pada tahun 2021. DKP menyediakan buku-buku yang berkenaan dengan pengolahan ikan, selain itu DKP juga menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidang tersebut untuk berbagi ilmu kepada masyarakat. Mulai dari membuat olahan ikan menjadi pempek, membuat cuka sampai ke tahapan *packing* kemasan yang menarik sehingga mempunyai daya jual di masyarakat. Dalam hal ini masyarakat juga diberi pelatihan bagaimana menjaga mutu pengolahan dan pemasaran ikan untuk menghasilkan produk yang aman dikonsumsi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan untuk menghasilkan produk yang layak untuk didistribusikan kepada konsumen.

DKP Kota Jambi selain memberikan pelatihan tentang pengolahan dari bahan baku ikan, untuk meningkatkan kreatifitas dari masyarakat juga mengadakan pelatihan keterampilan menghias tumpeng. DKP melihat masyarakat Kota Jambi yang dapat dikatakan konsumtif dalam pemesanan tumpeng, hal ini menjadi dasar DKP untuk memberikan pelatihan menghias tumpeng kepada masyarakat dengan tujuan agar nilai jual tumpeng bisa lebih tinggi. Dengan diadakannya pelatihan ini dapat membantu masyarakat dalam segi ekonomi, banyak ibu rumah tangga yang awalnya tidak ada pekerjaan, kini sudah bekerja dengan membuka jasa pemesanan tumpeng. Salah satu indikator perpustakaan berbasis inklusi sosial ialah perpustakaan dituntut untuk dapat mengembangkan serta memberikan pengetahuan yang bisa membantu kehidupan maupun perubahan di masyarakat. Pengembangan pengetahuan ini telah dilaksanakan oleh DKP Kota Jambi dalam mendukung program perpustakaan berbasis inklusi sosial.

3. Perpustakaan menjadi wadah dalam memberikan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.

Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai tempat yang menyediakan informasi, baik yang berkaitan dengan sosial, politik, budaya, ekonomi dan informasi lainnya. Dengan adanya kesadaran tentang literasi informasi dari masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perekonomian dengan hadirnya lapangan usaha. Penyediaan buku-buku yang sesuai dengan

lapangan pekerjaan masyarakat guna mempermudah akses informasi bagi masyarakat yang ingin bersaing. Perpustakaan akan dianggap mampu menjadi wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila berhasil menyediakan informasi dari buku, internet dan lain sebagainya sesuai kebutuhan informasi yang dibutuhkan dan mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat serta terjun langsung dalam proses pendampingan. DKP Kota Jambi dapat membuktikan hal ini dengan mengadakan pelatihan keterampilan pengolahan limbah plastik. Melihat kondisi Kota Jambi yang rentan sekali dengan pembuangan sampah yang dilakukan masyarakat sehingga merusak kenyamanan kota. DKP Kota Jambi berinisiatif untuk mengurangi limbah plastik tersebut dengan mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara memanfaatkan limbah plastik yang terbuang dan masih layak di perbarui menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti asoi, koran yang dapat diperbarui menjadi pajangan bunga dari hasil limbah-limbah yang tidak berguna tersebut.

Pelatihan pengelolaan limbah plastik, DKP Kota Jambi mengadakan pelatihan yang mana sasarannya adalah masyarakat Kelurahan Lebak Bandung. Daerah Kelurahan Lebak Bandung merupakan daerah yang termasuk mempunyai banyak limbah plastik, sehingga ini menjadi masalah bagi Kelurahan tersebut. Oleh sebab itu DKP Kota Jambi melihat kondisi ini turut serta berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk mengadakan pelatihan dalam proses penanganan limbah plastik yang awalnya tidak berguna akan berdaya guna dan membantu masyarakat setempat dalam berkegiatan dan menambah perekonomian. Tidak hanya pengolahan limbah plastik, kegiatan yang lainnya juga sudah dilakukan oleh DKP Kota Jambi dalam mendukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Pelatihan lainnya yang dilakukan oleh DKP Kota Jambi dalam mendukung program perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu pengolahan limbah minyak jelantah (minyak bekas). Sebagai masyarakat Indonesia kita sudah sangat akrab dengan olahan makanan yang di goreng. Minyak bekas gorengan ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang bisa merusak tubuh. Namun jika dibuang begitu saja, limbah minyak jelantah (bekas) ini akan dapat mencemari lingkungan, terutama tanah dan sungai. DKP Kota Jambi menyadari itu sangat mencemari lingkungan, maka dari itu DKP berinisiatif untuk mengadakan kegiatan pelatihan pengolahan minyak jelantah untuk menjadi berdaya guna. Pelatihan keterampilan pengolahan minyak jelantah ini merupakan suatu keterampilan mendaur ulang minyak jelantah menjadi lilin aroma terapi dan sabun. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta meningkatkan perekonomian dengan mendirikan UMKM untuk masyarakat.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh DKP Kota Jambi, kita dapat melihat bahwa implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosial telah terlaksana. Banyak pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan dan diikuti oleh masyarakat mampu mengubah paradigma berfikir serta meningkatkan literasi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh DKP Kota Jambi secara berkelanjutan juga dapat mengubah perekonomian masyarakat. Masyarakat merasa terbantu dalam mencari pekerjaan dan akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran. Kegiatan dan pelatihan yang dilakukan dalam mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh DKP Kota Jambi sangat diterima di masyarakat. Namun yang menjadi kendala DKP Kota Jambi dalam memaksimalkan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah masalah pengangguran dana dan kurangnya sumber daya manusia. Anggaran yang diperuntukan dalam program ini tidak terlalu besar sehingga untuk pemerataan akan kebutuhan informasi maupun pelatihan-pelatihan yang diadakan sangat terbatas. DKP Kota Jambi sedang mengupayakan untuk membangun jejaring dan melakukan kerjasama ke pihak-pihak terkait guna untuk menjaga keberlangsungan dalam menjalankan program perpustakaan berbasis inklusi sosial.

CONCLUSIONS (خلاصة \ خاتمة)

Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi telah terlaksana meskipun belum optimal dan merata. DKP Kota Jambi telah menerapkan konsep-konsep dasar perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu melakukan peningkatan pelayanan melalui buku dan internet dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal pelibatan masyarakat DKP Kota Jambi sudah melaksanakan kegiatan dan pelatihan yang melibatkan masyarakat dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi masyarakat dan membuat langkah-langkah yang strategis untuk mengadakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelatihan bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas tuli merupakan kegiatan yang dilakukan DKP Kota Jambi untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi. Kemudian pelatihan seperti mengolah limbah plastik dan minyak jelantah yang telah dilakukan oleh DKP Kota Jambi telah mampu mengubah cara berfikir masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, DKP Kota Jambi juga telah membuktikan bahwa perpustakaan berperan aktif dalam pengembangan SDM masyarakat yang kreatif dan inovatif. DKP Kota Jambi selalu melibatkan masyarakat dan membantu masyarakat untuk membangun kemitraan guna untuk keberlanjutan perpustakaan berbasis inklusi sosial agar terlaksana sesuai dengan tujuan.

BIBLIOGRAPHY (قائمة المراجع)

- Abdurrahman Misno.2020. *Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*. Inais
- David.2014. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta : Salemba Empat
- Riska Darmayanti.2021. *Membangun Budaya Literasi Informasi bagi Masyarakat Kampus*. Jurnal Iqra', Vol. 10. No. 01
- Elva Rahman. 2018. *Akses dan Layanan Perpustakaan*. Jakarta: Kencana
- Hartono. 2016. *Manajemen Perpustakaan Profesional*. Jakarta: Sagung Seto
- Hartono.2017. *Strategi Pengembangan Perpustakaan Dalam Membangun Akseibilitas Informasi*. Jurnal Perpustakaan Vol.8 No.1
- Rachman Hermawan dan Zulfikar Zen. 2006. *Etika Kepustakawanan: suatu pendekatan terhadap profesi dan kode etik pustakawan Indonesia*. Jakarta: Agung Seto
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Libraries for All: Social Inclusion in Public Libraries Policy Guidance for Local Authorities in England October 1999 (Departemen for Culture, Media and sport, Gov. UK).
- Lubis Hairani.2022. *Pemberdayaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi.
- Malawa, Suharyanto. 2019 . *Model dan Konsep Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Era Digital*. Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia.
- Marwadani. 2022. *Praktis Penelitian Kualitatif : Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublisher
- Prasetyawan, Y. Y., & Suharso. P. *Inklusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Perpustakaan Desa*. Acarya Pustaka
- Sulistyo Basuki. 2014. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. (Jakarta : Universitas Terbuka)

Woro Titi Haryanri. *Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*. Talenta Publisher, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2019

https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/Peraturan_Perpustakaan_Nasional_Nomor_3_Tahun_2023_tentang_Transformasi_Perpustakaan_Berbasis_Inklusi_Sosial_salinan.pdf.

https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU_No._43_Tahun_2007_tentang_Perpustakaan_.pdf.